

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Reviu Penelitian Terdahulu

Ramadhaningsih (2013); Susanti dan Riharjo (2013); Listyaningsih *et al.* (2018) menyakatan bahwa penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan manajerial secara positif memengaruhi pengungkapan CSR. Ini dapat dijelaskan dengan peningkatan kepemilikan saham oleh manajer, sehingga diharapkan bahwa manajer akan bertindak selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan sehingga mereka berhati-hati dalam membuat keputusan serta membentuk tanggung jawab kepada pemegang saham dan sekitarnya masyarakat.

Nuraini *et al.* (2018) melakukan dengan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2013. Pengukuran yang digunakan ialah menggunakan *indonesian environmental reporting (IER) index*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap *environmental disclosure*. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan tanggung jawab dewan komisaris pada perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya dan dewan komisaris mempunyai peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup di Inonesia.

Yusran *et al.* (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2016. Penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi data panel,

menunjukkan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *corporate social responsibility disclosure* pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2016) dengan objek penelitian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan *et al.* (2018) dengan objek perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan dewan direksi sebagai variabel independennya sehingga hasil penelitiannya menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Semakin banyak jumlah direksi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*. Hasil ini menunjukkan pentingnya jumlah dewan direksi yang mencukupi, sehingga mereka mampu memberikan tambahan masukan bagi pelaksanaan *corporate social responsibility* yang lebih baik.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Agency Theory

Teori Keagenan (*agency theory*) sering disebut pula dengan *contracting theory*. Dalam *agency theory* dinyatakan bahwa perusahaan berada pada titik persimpangan pada berbagai jenis hubungan kontraktual antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa

setiap individu bertindak untuk kepentingan terbaiknya. Karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda, benturan-benturan kepentingan ini menimbulkan berbagai konflik diantaranya konflik deviden, *dilution*, *distortion of investmen and underinvestment*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.

Konsep *agency theory* menyatakan manajemen sebagai agen semestinya *on behalf of the best interest of the shareholders*, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan sehingga untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *Agency Problem* yang salah satunya disebabkan oleh adanya *asymmetric information*.

Adanya *asymmetric information* dan *self serving behavior* pada manajer atau agen, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada prinsipal sebagai pemilik perusahaan. *Agency theory* menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara para *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* mereka (manajemen). Berdasarkan kondisi semacam ini, dibutuhkan sistem tata kelola yang baik pada perusahaan yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Corporate Social Responsibility

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 4 lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksi dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Anggraini (2006);Ningsih (2017) Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk pembangunan. CSR sendiri

memiliki aspek lingkungan dan aspek social yang menjadi perhatian bagi perusahaan akhir-akhir ini.

3. Environmental Disclosure

Environmental disclosure adalah pengungkapan informasi di dalam laporan tahunan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Suratno *et al.*, 2006; Ningsih, 2017). Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan.

Bidang *environmental disclosure* meliputi hal-hal sebagai berikut, pengeluaran atau biaya operasi untuk fasilitas dari peralatan pengontrol polusi di masa lalu dan sekarang. Pujiati dan Lestari (2018) menyatakan bahwa dalam pengertian luasnya, pengungkapan berarti penyampaian informasi (*release of information*). Para akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak terbatas, yaitu penyampain informasi lingkungan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan.

Dalam penelitian digunakan standar GRI untuk menilai *environmental disclosure*. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). GRI yang di gunakan adalah GRI-G4 dengan aspek sekitar 34 untuk lingkungan. Perusahaan yang mengeluarkan *sustainability report* kebanyakan telah menerapkan aturan dari GRI.

4. Good Corporate Governance

Terdapat banyak mengenai penjelasan arti dari *good corporate governance*. Menurut KNKG (2006) *good corporate governance* adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun dengan iklim usaha di suatu negara. Sedangkan menurut FCGI (2002) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu konsep yang mengatur kinerja perusahaan dalam pengelolaan yang dimana dapat mencegah kecurangan – kecurangan yang terjadi serta memberikan nilai tambah perusahaan kepada

pemegang saham. Prinsip dasar GCG yang disusun terutama oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:

- 1) Transparansi (Transparency), berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan informasi secara terbuka, benar, kredibel, tepat waktu, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi.
- 2) Akuntabilitas (Accountability), prinsip ini berhubungan dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban yang mengendalikan organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
- 3) Tanggung Jawab (Responsibility), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku
- 4) Independensi (Independency), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) Kesenjajaran dan Kewajaran (Fairness) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian ini menggunakan proksi dari *good corporate governance* yaitu, dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan managerial dan komite audit yang dimana kelima proksi ini dipilih karena *good*

corporate governance ini adalah sebuah sistem yang saling berhubung satu dengan yang lain.

a. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para investor untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola dan mengatur perusahaan. Menurut Fama dan Jensen (1983); (Kusanti dan Andayani, 2016) direktur memiliki dua fungsi utama yaitu: (1) berfungsi sebagai pembuat keputusan yang diambil oleh manajemen (strategi perusahaan yang bersifat jangka pendek, kebijakan investasi dan keuangan), (2) berfungsi dalam mengendalikan keputusan (kompensasi manajerial, pengawasan alokasi modal).

Masing-masing anggota direksi dapat menjalankan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Agar terciptanya pelaksanaan tugas dari para direksi yang efektif, maka terdapat prinsip-prinsip yang perlu dilakukan sesuai dengan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia dalam (KNKG, 2006) :

1. Komposisi dewan direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.

4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ puncak pengelolaan internal perusahaan memiliki peran terhadap aktivitas pengawasan, sehingga komposisi dewan komisaris menentukan pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan (Ningsih, 2017). Menurut (Iswandika, 2014); Yusran *et al.* (2018) dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris dapat dikatakan pula sebagai wakil dari para investor atau pemilik perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen.

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham mewakili kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau melemahkan terhadap akan adanya manajemen. Dengan adanya institusional ownership, monitoring pada perusahaan akan meningkat. Hal ini disebabkan karena institusi lain yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan memonitor lebih ketat, yang didukung oleh information channel yang lebih baik dibandingkan kepemilikan saham oleh individu. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%)

mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

d. Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes *et al.* (1999); Oktafianti dan Rizki (2016) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

e. Komite Audit

Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang Komite Audit menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Lebih lanjut, FCGI (2002) menyatakan bahwa Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan dengan besar-kecilnya organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal.

C. Hubungan *Good Corporate Governance* terhadap *Environmental Disclosure*

Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh investor untuk mewakili kepentingan para investor dalam mengelola dan mengatur perusahaan. Peran dari dewan direksi adalah sebagai pengambil keputusan yang diambil oleh manajemen dan *controlling* terhadap keputusan tersebut. Investor menginginkan dewan direksi untuk mementingkan keputusannya dalam pengungkapan lingkungan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak dewan direksi yang ada pada perusahaan maka manajemen akan terkontrol dalam keputusannya sehingga keputusan manajemen mengenai melakukan pengungkapan terhadap lingkungan akan terjamin dan diungkapkan sebanyak-banyak sesuai dengan keinginan dewan direksi.

Dewan komisaris adalah organ tertinggi dalam perusahaan. Dewan komisaris memiliki peran sebagai pengawasan terhadap manajemen Bersama komite audit dan mewajibkan terlaksanakannya akuntabilitas diperusahaan. Semakin banyak dewan komisaris maka semakin terawasinya manajemen sehingga manajemen akan melakukan pengungkapan lingkungan sebanyak-banyaknya.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang di miliki oleh institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki kekuatan pada implementasi *good corporate governance* sehingga mampu melindungi hak pemegang saham yang lainnya. Semakin banyak saham dimiliki oleh institusi lain maka mampu meningkatkan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan

mengenai pengungkapan lingkungan sehingga mampu meningkatkan keputusan investasi institusi lain.

Kepemilikan managerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manager yang bekerja di perusahaan. Kepemilikan managerial mampu mensejajarkan antara kepentingan investor dan kepentingan managerial, karena kepemilikan managerial juga memiliki saham pada perusahaan sehingga akan memikirkan kepentingan yang lain. Semakin banyak kepemilikan managerial maka akan meningkatkan pengawasan manajemen untuk mengungkapkan lingkungan karena kepemilikan saham oleh manajemen sehingga perusahaan akan mengungkapkan lingkungan yang dimana mampu meningkatkan *image* perusahaan dan nilai saham perusahaan.

Komite audit adalah mekanisme *good corporate governance* dalam perusahaan mengenai pengawasan tertinggi. Komite audit berperan sebagai memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya serta system pengawasan internal. Semakin banyak komite audit maka pengawasan atau *monitoring* terhadap manajemen baik sehingga perusahaan akan mengungkapkan lingkungan yang banyak.

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Environmental Disclosure*

Masalah keagenan atau *agents conflict* yang terjadi antara *principals* dan *agents* yang menyebabkan kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan *principals* (Jansen dan Meckling, 1976) sehingga dapat

teratasi dengan adanya mekanisme *good corporate governance* dengan meningkatkan proporsi dewan direksi. Dewan direksi berperan sebagai pengambil keputusan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Djajadikerta dan Trireksani (2016); Setiawan *et al.* (2018) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Semakin banyak jumlah direksi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR. Hasil ini menunjukkan pentingnya jumlah dewan direksi yang mencukupi, sehingga mereka mampu memberikan tambahan masukan pelaksanaan CSR.

Penelitian yang dilakukan menggunakan ukuran dewan direksi sebagai pengukurannya. Dewan direksi pada perusahaan sebagai pengambil keputusan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Kusanti dan Andayani, 2016) sehingga dengan adanya dewan direksi akan menentukan apakah perusahaan akan melaporkan pengungkapan lingkungannya secara banyak maupun sedikit. Sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan pengungkapan lingkungannya.

H₁ : Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure*

Permasalahan tentang *agency cost* dapat dikurangi dengan menunjuk dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas perusahaan antara dewan direksi dengan pemilik saham. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2017); Nuraini *et al.* (2018) mengatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Semakin banyak jumlah

dewan komisaris maka pengungkapan lingkungan semakin dilakukan oleh manajemen karena adanya pengawasan yang lebih baik sehingga dapat menunjukkan bahwa *image* perusahaan semakin baik pula. Dari penjelasan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap *environmental disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan tanggung jawab dewan komisaris pada perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya dan dewan komisaris mempunyai peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dewan komisaris memiliki peran penting sebagai pengawasan yang dimana mampu menentukan pengungkapan lingkungan perusahaan.

H₂: Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Environmental Disclosure*

Permasalahan mengenai *agency cost* di kurangi dengan menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang meningkat. Novitaningrum dan Amboningtyas (2017) melakukan penelitian dengan hasil membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability report*. Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan sahamnya dimiliki oleh institusi yang lebih besar cenderung memberikan dukungan pada perusahaan melakukan pengungkapan *sustainability report*. Listyaningsih *et al.* (2018) menyatakan bahwa:

“The result is institutional ownership which positively influences corporate social responsibility disclosure. It can be explained that the greater the institutional ownership, the greater the oversight of management. Institutional ownership may require companies to increase corporate social responsibility disclosure, as large institutional ownership is better in monitoring management performance.”

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intensif. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* yang dimana semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar juga pengawasan yang dilakukan sehingga perusahaan akan mengungkapkan lingkungannya.

H₃: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Environmental Disclosure*

Permasalahan tentang *agency cost* dapat teratasi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2017) mengatakan bahwa hasil penelitian terbukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility*, dapat diartikan bahwa semakin rendah proporsi kepemilikan saham manajerial, maka justru semakin menambah tingginya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Hal tersebut dilakukan perusahaan karena ingin menunjukkan image perusahaan di mata investor. Namun penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih *et al.* (2018) penelitian yang dilakukan menunjukan hasil bahwa:

“this study found that managerial ownership positively affects corporate social responsibility disclosure. This can be explained by the increase of share ownership by managers, so it is expected that managers will act in harmony with the interests of stakeholders so that they are careful in making decisions as well as forming responsibility to the shareholders and the surrounding community.”

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktafianti dan Rizki (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai koefisien pengaruh yang bertanda positif yang berarti semakin meningkat kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pengungkapan informasi lingkungan.

Kepemilikan manajer yang semakin besar di dalam perusahaan membuat manajer lebih memikirkan kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Manager perusahaan merasa memiliki perusahaan tersebut dengan memiliki saham perusahaan sehingga manager akan semaksimal mungkin untuk mengungkapkan lingkungan perusahaan yang dimana akan meningkatkan citra perusahaan dengan begitu saham perusahaan akan meningkat.

H₄ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

5. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Environmental Disclosure*

Permasalahan mengenai *agency cost* membutuhkan pengawasan bersama dengan dewan komisaris dalam proses pengungkapan informasi. Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang “Komite Audit” menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite

audit. Indriani (2016) menyatakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Jadi, semakin banyak jumlah komite audit maka tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan semakin tinggi. Karena komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik dan Pengungkapan lingkungan perusahaan.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariningtika dan Kiswara (2013); Yusran *et al.* (2018) bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *corporate social responsibility disclosure* pada sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2011-2016. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Novitaningrum dan Amboningtyas (2017) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *environmental disclosure*. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penunjukan Komite Audit masih belum jelas dan terbuka, sehingga keindependensiannya masih patut diragukan.

Komite audit sangat penting bagi pengawasan perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas pengawasan termasuk praktik pengungkapan lingkungan perusahaan. Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa komite audit berperan positif dengan *environmental disclosure* yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dengan adanya komite

audit pengawasan yang dilakukan membuat perusahaan mengungkapkan lingkungannya.

H₅ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*

D. Rerangka Pemikiran

